

# Korelasi Dan Implementasi *Good Corporate Governance* Tentang Kinerja Financial Dan Dampaknya Pada Pelayanan Publik Perusahaan Swasta , Rumah Sakit, Pemerintahan, BUMN Serta Perguruan Tinggi

Puti Surahati Tarigan<sup>1</sup> , Maya Macia Sari<sup>2</sup> ,Iqbal Purnama<sup>3</sup> , Tri Sumarti<sup>4</sup>

Management Departemen Universitas Pembangunan Pancabudi - Indonesia

Jl. Jendral Gatot Subroto KM. 4,5 Sei Sikambing, Medan

Puti Surahati Tarigan ; [tris80933@gmail.com](mailto:tris80933@gmail.com)

## Abstract.:

*Good Governance is a framework of governance that serves as an integral part of an organization's behavior pattern, encompassing rules and ethical norms to uphold order, integrity, and performance of companies or governmental entities. It fosters conditions conducive to and focuses on achieving organizational goals, thereby impacting the accreditation of the organization. The principles of Good Corporate Governance are not only relevant within business entities but are also necessary across various sectors including private, governmental, and even educational. Effective governance implementation at all levels will yield optimal performance.*

**Keywords:** *Good Governance, Financial Performance, Public Service*

**Abstrak :** *Good Governance* merupakan kerangka tata kelola yang merupakan bagian integral dari pola perilaku suatu organisasi, yang mencakup aturan dan norma etika untuk mengamankan ketertiban, integritas, dan prestasi perusahaan atau entitas pemerintahan. Ini mendorong kondisi yang mendukung dan fokus pada pencapaian tujuan organisasi, dengan akibatnya memengaruhi akreditasi organisasi tersebut. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tidak hanya relevan di dalam entitas bisnis, tetapi juga diperlukan dalam berbagai sektor termasuk swasta, pemerintahan, dan bahkan pendidikan. Implementasi tata kelola yang efektif di semua level akan menghasilkan kinerja yang optimal.

**Kata Kunci :** *Good Governance, Kinerja Financial, Pelayanan Publik*

## LATAR BELAKANG

Penerapan *Good Corporate Governance* menjadi semakin penting sejak munculnya skandal-skandal akuntansi seperti kasus Enron dan Worldcom yang melibatkan praktik akuntansi yang tidak etis, di Indonesia, beberapa kasus serupa juga terjadi, seperti pada PT. Lippo dan PT. Kimia Farma, yang dimulai dengan terdeteksinya manipulasi dalam laporan keuangan (Boediono, 2005). Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan baik dalam organisasi maupun lembaga pemerintahan, yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari departemen terkait dan juga sikap oknum di dalamnya. Sistem yang buruk dan rumit juga dapat menghambat kemajuan proyek dan akhirnya berdampak pada anggaran yang sudah disiapkan. Oleh karena itu, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi suatu

---

Received: February 25, 2024; Accepted: February 26, 2024; Published: February 28, 2024

\* Puti Surahati Tarigan ; [tris80933@gmail.com](mailto:tris80933@gmail.com)

kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap organisasi. Harapannya, GCG dapat meningkatkan kinerja perusahaan, menjadikan perusahaan lebih berintegritas, dan mendapatkan akreditasi yang baik di mata masyarakat, khususnya pelanggan yang menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan, dengan demikian, hal ini dapat menjadi hubungan yang saling menguntungkan dalam jangka panjang.

*Good Governance* merupakan kerangka tata kelola yang merupakan bagian integral dari pola perilaku suatu organisasi, yang mencakup aturan dan norma etika untuk mengamankan ketertiban, integritas, dan prestasi perusahaan atau entitas pemerintahan. Ini mendorong kondisi yang mendukung dan fokus pada pencapaian tujuan organisasi, dengan akibatnya memengaruhi akreditasi organisasi tersebut. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tidak hanya relevan di dalam entitas bisnis, tetapi juga diperlukan dalam berbagai sektor termasuk swasta, pemerintahan, dan bahkan pendidikan. Implementasi tata kelola yang efektif di semua level akan menghasilkan kinerja yang optimal.

Prinsip dasar dari *Good Corporate Governance* (GCG) adalah usaha untuk menjadikan GCG sebagai panduan bagi perusahaan dalam mengelola manajemen perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG seiring dengan kemajuan teknologi yang terus berlangsung, yang dapat mengubah budaya kerja di suatu organisasi dan berpotensi menimbulkan dampak pada sistem pengawasan, termasuk manipulasi data atau kecurangan cyber lainnya yang dapat merugikan dan menurunkan nilai perusahaan baik dari sudut pandang rekanan maupun pelanggan. Maka dari itu, penerapan GCG diperlukan agar perusahaan menjadi lebih kuat dan mampu bersaing di pasar yang ketat. Oleh karena itu, komitmen terhadap etika bisnis menjadi penting untuk mewujudkan lingkungan kerja yang sehat, efisien, dan transparan dalam budaya organisasi. GCG sebagai sistem dari budaya organisasi dapat membantu perusahaan menjadi lebih baik, dengan menghambat praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Lingkungan kerja yang kondusif dan terorganisir dengan baik akan meningkatkan disiplin anggaran, memanfaatkan pengawasan, serta mendorong efisiensi pengelolaan perusahaan. Bukti bahwa suatu perusahaan telah melakukan kinerja yang baik dapat dilihat dari laporan keuangannya, karena dari laporan keuangan tersebut dapat terlihat kondisi keuangan perusahaan dalam satu periode kerja.

Banyak hasil penelitian mengenai dampak dari GCG memberikan hasil yang beragam, hal ini disebabkan oleh variasi indikator dari setiap variabel yang digunakan dan perbedaan kinerja keuangan yang diamati. Menurut Darmawati dan rekan (2004), menggunakan variabel independen ROE dan Tobin's Q, mereka menemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara *Good Corporate Governance* dengan Tobin's Q. Sebaliknya, *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh yang besar terhadap ROE. Analisis Rosyada (2012) mengenai pengaruh mekanisme GCG pada manajemen laba dan kinerja keuangan menyimpulkan bahwa mekanisme Corporate Governance tidak menunjukkan bukti pengaruhnya pada manajemen laba, tetapi mekanisme Corporate Governance dari pihak manajemen tingkat atas (seperti kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen) terbukti memberikan pengaruh pada kinerja keuangan. Dalam teori Agensi, pandangan tentang *Corporate Governance* adalah dasar pemahaman kita, serta konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer). Manajer sebagai agen memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan daripada pemilik, yang mengakibatkan terjadinya asimetri informasi. Untuk mengatasi asimetri informasi ini, dilakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan perusahaan yang memastikan agar pengelolaan perusahaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap organisasi melakukan upaya pengawasan yang biasanya dikenal sebagai biaya agensi, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengurangi kemungkinan kerugian yang mungkin timbul menurut teori ini.

## **KAJIAN TEORITIS**

Definisi *Good Governance* Menurut pendapat Tjager dkk. (2003:25) dalam tulisannya " *Forum for corporate governance in Indonesia* " adalah :

*Corporate Governance* adalah peraturan yang mengatur interaksi antara pemegang saham, manajemen perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak lain yang terlibat, yang semuanya terkait dengan hak-hak, kewajiban, dan pengendalian perusahaan. Tujuan utama dari *Corporate Governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat (stakeholder). Menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002, *Corporate Governance* adalah proses dan struktur yang digunakan oleh badan usaha milik negara (BUMN) untuk meningkatkan

kinerja dan akuntabilitas perusahaan, dengan tujuan mencapai nilai jangka panjang bagi para pemegang saham sambil memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan pada peraturan dan etika. Dengan demikian, *Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur hubungan antara stakeholder untuk mencapai tujuan organisasi dan mencegah terjadinya kesalahan dalam interaksi tersebut. (Tjager dkk., 2003:50).

lima prinsip utama dalam *Corporate Governance* , menurut FCG yaitu:

1. Keadilan (*Fairness*)
2. Transparansi (*Transparency*)
3. Kemandirian (*Independency*)
4. Akuntabilitas (*Accountability*)
5. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Mekanisme *Good Corporate Governance* terbagi menjadi dua bagian, yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal melibatkan dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, serta struktur kepemilikan, sementara mekanisme eksternal lebih berkaitan dengan pengaruh dari pasar terhadap pengendalian perusahaan dan sistem hukum yang berlaku (Dennis dan McConnell dalam Diyanti, 2010).

Dewan komisaris merupakan elemen utama dalam pengelolaan internal perusahaan dan memiliki peran penting dalam melakukan fungsi pengawasan. Menurut Farida, Prasetyo, dan Herwiyanti (2010), dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Komposisi dewan komisaris independen diukur berdasarkan persentase jumlah anggota dewan komisaris independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan.

Komite audit bertanggung jawab atas pengawasan laporan keuangan, pengawasan audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal, termasuk audit internal. Menurut Kurnianingsih dan Supomo (1999), komite audit memiliki beberapa fungsi, seperti memastikan objektivitas, kredibilitas, dan keandalan laporan keuangan, serta mengevaluasi kebijakan akuntansi dan kemungkinan terjadinya penipuan.

Kepemilikan saham manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan. Menurut Bagnani dan rekan (dalam Nuraeni, 2010), struktur kepemilikan saham manajerial diukur

berdasarkan persentase saham biasa atau opsi saham yang dimiliki oleh direktur dan pejabat perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham tersebut oleh manajemen, maka manajemen akan lebih berdedikasi dalam memperjuangkan kepentingan pemegang saham, karena mereka juga akan bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, atau perusahaan investasi. Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam memantau manajemen karena mereka cenderung melakukan pengawasan yang lebih intensif. Melalui investasi mereka dalam pasar modal, kepemilikan institusional dapat memberikan tekanan yang signifikan pada manajemen untuk mencapai kinerja yang baik demi kemakmuran pemegang saham.

Kinerja Keuangan perusahaan adalah gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dapat dianalisis menggunakan alat-alat analisis keuangan. Kondisi keuangan ini mencerminkan baik buruknya prestasi kerja perusahaan dalam periode tertentu. Hal ini penting karena memungkinkan sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Penilaian kinerja keuangan juga merupakan cara bagi manajemen untuk memenuhi kewajibannya kepada investor dan mencapai visi misi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja keuangan juga merupakan indikator efektivitas dan efisiensi suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.

Ross dan kolega (2009:78) mengungkapkan bahwa rasio digunakan sebagai alat untuk membandingkan dan menyelidiki hubungan antara berbagai informasi keuangan. Rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas sering digunakan. Rasio likuiditas, misalnya, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa tekanan berlebihan (Ross dkk., 2009:79), fokus pada aset lancar dan kewajiban lancar. Solvabilitas, atau sering disebut leverage ratio, mengukur kemampuan jangka panjang perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya (Ross dkk., 2009:83). Profitabilitas, di sisi lain, mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan efisien menggunakan aset dan mengelola operasinya (Ross dkk., 2009:89). Rasio Profitabilitas menunjukkan tingkat penghasilan pemegang saham dari investasi mereka.

Komite audit memiliki dampak terhadap kinerja keuangan. Ini menunjukkan bahwa dengan pembentukan komite audit, manajemen dapat dipantau untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka. Begitu juga, kepemilikan institusional memiliki pengaruh pada kinerja keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh institusi di luar perusahaan dapat menjadi pengendali dalam pengambilan keputusan oleh manajemen, sehingga tercipta kinerja keuangan yang baik. Demikian pula, keberadaan komisaris independen telah terbukti memiliki dampak pada kinerja keuangan. Dengan penunjukan komisaris independen pada Rapat Umum Pemegang Saham, mereka dapat memberikan pengawasan langsung terhadap direksi dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Munculnya skandal keuangan yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar seperti Enron, WorldCom, Tyco, Global Crossing, dan terakhir AOL-Warner telah mendorong banyak perusahaan untuk mulai mengadopsi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Hal ini menimbulkan tuntutan untuk meningkatkan kualitas good corporate governance (Soegiharto, 2005: 38). Istilah *Good Corporate Governance* sudah dikenal di Amerika Serikat setelah krisis ekonomi Amerika pada tahun 1930-an.

### **Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance**

Berikut adalah Prinsip-prinsip Good Corporate Governance menurut Menteri BUMN No. Kep-117/M- BUMN tanggal 1 Agustus 2002 pasal 3, yaitu:

1. **Keterbukaan** ; merujuk pada tingkat transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi yang relevan tentang perusahaan, serta mencegah penyembunyian informasi yang bertentangan dengan kepentingan pengguna atau pemangku kepentingan.
2. **Kejelasan** ; mengacu pada pemahaman yang jelas tentang fungsi-fungsi, pelaksanaan, dan tanggung jawab organisasi, sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilakukan secara efektif.
3. **Tanggung jawab** ; menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi-fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organisasi untuk memastikan pengelolaan perusahaan yang efektif.

4. **Kepatuhan** ; mengacu pada kepatuhan dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. **Keadilan** ; mencakup aspek keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perjanjian dan peraturan yang berlaku.

Penerapan secara konsisten terhadap prinsip-prinsip GCG telah terbukti meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasley et al., 1996). Selain itu, Chtourou et al. (2001) mencatat bahwa penerapan konsisten prinsip GCG juga dapat membatasi aktivitas rekayasa.

## **METODE**

Dalam mengukur *Good Corporate Governance* (GCG) dalam sebuah perusahaan atau lembaga, beberapa metode penelitian yang umum digunakan meliputi:

1. **Survei atau Kuesioner**: Metode ini melibatkan penggunaan kuesioner atau survei untuk mengumpulkan data dari berbagai pihak yang terlibat atau memiliki pengetahuan tentang praktik GCG dalam perusahaan atau lembaga tersebut. Kuesioner dapat dirancang untuk mengevaluasi persepsi dan praktik GCG berdasarkan berbagai dimensi, seperti transparansi, akuntabilitas, independensi, dan keadilan.
2. **Analisis Dokumen**: Melibatkan analisis dokumen resmi perusahaan atau lembaga, seperti laporan tahunan, laporan keuangan, kode etik, kebijakan perusahaan, dan dokumen-dokumen lain yang relevan. Analisis dokumen dapat memberikan wawasan tentang praktik GCG yang ada, kebijakan yang diterapkan, dan tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Good Governance di Pemerintahan**

#### **a. Faktor - faktor yang mempengaruhi Good Corporate Governance**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap implementasi Perencanaan Strategis (Renstra) terkait dengan berbagai aktivitas dan kinerja pemerintah daerah kepada para pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Beberapa faktor yang memengaruhi penerapan prinsip good governance meliputi sistem akuntansi pemerintahan, budaya organisasi, kinerja aparatur pemerintah daerah, peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Keberhasilan dalam menerapkan *Good Governance* tidak akan tercapai tanpa dukungan dari faktor-faktor tersebut.

Faktor- faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya *Good Corporate Governance* tersebut adalah :

- 1) Faktor pertama adalah sistem akuntansi pemerintahan. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa peningkatan perencanaan dan pengendalian aktivitas pemerintahan dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem akuntansi sektor publik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas pemerintah daerah, khususnya dalam memberikan informasi mengenai aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan adanya sistem akuntansi yang kredibel, pencapaian *Good Governance* dapat lebih mudah terwujud.
- 2) Faktor kedua adalah budaya organisasi. Mardiasmo, Barnes, dan Sakurai (2008) mengemukakan bahwa budaya pemerintahan daerah merupakan hambatan utama dalam menerapkan *Good Governance*. Oleh karena itu, diharapkan bahwa budaya organisasi dapat menjadi motivasi bagi aparat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik guna mendukung penerapan prinsip *Good Governance* dalam pemerintahan.
- 3) Faktor ketiga adalah kinerja aparatur pemerintah daerah. Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan kualitas aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia (Enceng & Purwaningdyah, 2008). Untuk menghasilkan informasi laporan keuangan yang bermanfaat, diperlukan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan sistem keuangan daerah dan pegawai pemerintah yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi (Tuasikal, 2009).

- 4) Faktor keempat adalah aparat pengawasan intern pemerintah. Institusi APIP pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota dikenal dengan Inspektorat provinsi/kabupaten/kota. *Good Governance* dapat terwujud jika lembaga pengawasan dan audit internal berfungsi dengan baik (Mardiasmo, 2002).
- 5) Faktor kelima adalah sistem pengendalian intern pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, tujuan dari sistem pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan yang terpercaya terhadap pencapaian efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

**b. Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan terhadap Penerapan *Good Governance*.**

Menurut Pazri (2016), pengelolaan keuangan daerah yang efektif dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dapat menghasilkan pertanggungjawaban finansial yang jelas terhadap setiap pemasukan dan pengeluaran anggaran, yang pada gilirannya akan menciptakan akuntabilitas publik. Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Berdasarkan penelitian Yusniyar, Darwis, dan Abdullah (2016), disimpulkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan memiliki dampak yang signifikan terhadap penerapan *Good Governance*.

**c. Pengaruh Peran APIP terhadap Penerapan *Good Governance*.**

Menurut Mardiasmo (2002), keberhasilan mencapai *Good Governance* tergantung pada kinerja yang efektif dari lembaga pengawas dan pemeriksa (audit Internal). Auditor Internal merujuk pada audit yang dilakukan oleh unit pemeriksaan yang merupakan bagian dari organisasi yang diperiksa. Wakhyudi (2010) menjelaskan bahwa peran APIP sebagai auditor intern pemerintah meliputi upaya mendorong terwujudnya *Good Governance* dan *Clean*

*Government*, mengembangkan sinergi pengawasan, mendukung upaya pemberantasan KKN, dan mengoptimalkan peningkatan penerimaan negara. Armana (2016) menunjukkan bahwa Satuan Pengawasan Internal (SPI) memiliki dampak pada implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Dengan menjalankan peran sebagai aparat pengawasan intern yang efektif, SPI akan membantu mewujudkan peningkatan dalam penerapan *Good Governance*.

**d. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Penerapan *Good Governance*.**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP mencakup lima elemen untuk memastikan bahwa tujuan pengendalian internal terpenuhi. Dengan menerapkan pengendalian internal yang efektif, informasi keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah akan menjadi handal, relevan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun *Good Governance*. Implementasi sistem pengendalian internal akan mempengaruhi penerapan *Good Governance*, seperti yang disebutkan oleh Sari (2013), Lestari (2008), dan Armana (2016).

**e. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Penerapan *Good Governance*.**

Penerapan budaya yang konsisten dalam sebuah organisasi dapat meningkatkan efektivitas organisasi tersebut. Menurut Stephen Robbins (1994) yang dikutip dalam Fahmi (2014), budaya yang kuat ditandai oleh nilai inti yang dianut secara konsisten, diatur dengan baik, dan dirasakan bersama-sama oleh anggota organisasi. Budaya organisasi yang kuat dan merata akan berkontribusi pada kesuksesan kinerja suatu organisasi pemerintah. Dengan demikian, kekuatan budaya organisasi dalam suatu lembaga pemerintah dapat membantu mencapai pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Menurut Hanpuwadal dan Ussahawanitchakit (2010), budaya organisasi merupakan salah satu aspek penting dari kegiatan organisasi.

**f. Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Penerapan *Good Governance*.**

Bastian (2001) yang dikutip dalam Verasvera (2016) mengartikan kinerja sebagai gambaran tentang sejauh mana suatu kegiatan, program, atau kebijakan berhasil dilaksanakan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi yang telah diatur dalam skema strategis suatu organisasi. Kinerja aparatur merupakan hasil dari pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan, mencerminkan kualitas dan kuantitas kerja yang dilakukan oleh seorang aparatur dalam menjalankan tugasnya, yang dipengaruhi oleh kemampuan dan sikap yang dimilikinya. Otonomi daerah menghadirkan isu sentral terkait terwujudnya pemerintahan yang berprinsip *Good Governance*. Oleh karena itu, dalam upaya menerapkan *Good Governance*, kinerja aparatur pemerintah yang baik, kondusif, responsif, dan adaptif diperlukan untuk membentuk karakteristik *Good Governance*. Menurut Ruspina (2013), kinerja aparatur pemerintah daerah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap *Good Governance*.

**2. *Good Governance* Di Perguruan Tinggi**

**a. Implementasi Sistem Pengendalian Internal *Good Governance***

Sistem pengendalian internal memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional, terutama dalam mencapai tujuan institusi serta kesuksesan reformasi sektor publik (PP No.19 tahun 2005; Altamuro dan Beatty 2010). Namun, implementasi sistem pengendalian internal masih belum optimal di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini terbukti dari hasil audit laporan keuangan Kementerian Pendidikan yang mendapat opini wajar dengan pengecualian pada tahun 2012 dan wajar tanpa pengecualian pada tahun 2013. Namun, selama periode yang sama (2012-2013), ditemukan indikasi tindakan kecurangan di beberapa Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan hasil audit operasional yang dilakukan oleh BPK. Situasi ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam tata kelola perguruan tinggi yang baik (*Good University Governance*), yang merupakan bagian dari pengaruh global atas paradigma *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut Bongani (2013), LSM di Zimbabwe menerapkan pengendalian internal dalam operasinya, dengan setiap bagian terkait

dengan aspek pengendalian internal yang sesuai dengan jenis, ukuran, dan posisi personel dalam organisasi.

#### **b. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal , Tata Kelola Perusahaan dan Kualitas Laporan keuangan**

Dalam pengendalian internal, elemen yang dapat memengaruhi standar laporan keuangan adalah *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik. Dalam UU Kesehatan No. 44 Tahun 2009, pasal 36 mengatur bahwa rumah sakit harus menerapkan tata kelola dan tata kelola klinis yang baik. Prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan, dan kewajaran, diharapkan dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan dan menyusun laporan tahunan yang berkualitas. GCG merupakan struktur dan proses yang digunakan perusahaan untuk meraih kesuksesan bisnis. Prinsip tata kelola perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan karena keakuratan waktu menjadi kunci penting dalam menyajikan informasi yang relevan. Penelitian oleh Mursidah & Khairina (2018) menunjukkan bahwa penerapan GCG secara positif dan signifikan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Demikian pula, studi oleh Mulyanti & Rahma (2020) menegaskan bahwa GCG berdampak pada kualitas laporan keuangan di PT Iron Bird Logistics. Implementasi prinsip-prinsip GCG di RSUD Bendan Pekalongan diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui pembenahan sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan.

#### **c. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Martani, et al., (2014) menyatakan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses yang dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai tentang efektivitas, efisiensi operasional, dan keandalan pelaporan keuangan. Implementasi pengendalian yang tepat dapat menciptakan kepercayaan yang tinggi terhadap kualitas laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan para pemegang saham. Mutiana, et al., (2017) menegaskan bahwa sistem pengendalian internal berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan; semakin baik dan kuat

sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan, maka kualitas laporan keuangan akan meningkat. Studi oleh Rokhlinasari & Hidayat (2016) dan Musa, et al., (2015) pada Rumah Sakit Islam Gorontalo menunjukkan bahwa pengendalian internal memiliki dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga peningkatan kualitas pelaksanaan pengendalian internal dapat mengoptimalkan kualitas laporan keuangan.

#### **d. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Tata Kelola Perusahaan merujuk pada struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk terus memberikan nilai tambah secara berkelanjutan dalam jangka panjang, sambil tetap memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan lainnya, sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku (IICG 2008). Rumah sakit yang menerapkan tata kelola organisasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan melalui prinsip-prinsip bisnis yang sehat dan etis. Maryana, et al., (2018) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip GCG memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan, dan jika diterapkan dengan baik, dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

### **KESIMPULAN**

Dari beragam pandangan ahli dan peraturan pemerintah, dapat disimpulkan bahwa komite audit memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan. Pembentukan komite audit memungkinkan pengawasan terhadap manajemen untuk meningkatkan kinerja keuangan, sementara kepemilikan institusional juga memiliki peranan penting dalam mengawasi kinerja keuangan. Ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh lembaga di luar perusahaan dapat menjadi kontrol dalam pengambilan keputusan manajemen, yang pada gilirannya berkontribusi pada kinerja keuangan yang baik. Demikian juga, keberadaan komisaris independen terbukti memiliki dampak terhadap kinerja keuangan. Penunjukan komisaris independen pada Rapat Umum Pemegang Saham secara langsung memberikan pengawasan terhadap direksi dalam implementasi kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Namun, kepemilikan manajerial yang minoritas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan, karena keputusan manajemen masih dipengaruhi

oleh pemegang saham mayoritas. Sebagai saran, disarankan untuk meningkatkan aktivitas rapat dewan komisaris dan ukuran dewan direksi agar data yang dihasilkan dapat lebih lengkap dalam menjelaskan dampak GCG terhadap kinerja keuangan.

## DAFTAR REFERENSI

- Hiro Tugiman. (2000). Pengaruh Peran Auditor Internal Serta Faktor- Faktor -Faktor Pendukung Terhadap Peningkatan Pengendalian Internal Dan Kinerja Perusahaan . Disertasi Doktor pada univ,padjadjaran
- Rosyada. (2012). Analisis Pengaruh Mekanisme *Corporat Governance* Terhadap Manajemen Laba Dan Kinerja Keuangan.
- Boediono, G. S. budiWitjaksono. (2005). Kualitas Laba : Studi Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Dan Damoak Manajemen Laba Dengan Menggunakan Analisis Jalur. Simposium Nasional Akuntansi VIII. So;O.
- Soegiharto. (2005). Peran Akuntan Dalam Menagakan *Good Corporate Governance* .Auditor. No.18.
- I. Nyoman Tjager, et el. (2003). *Corporate Governance: Tantangan Dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. PT Prenhalindo, Jakarta.
- Hirsch, M. L. (1994). *Advanced Management Accounting*.Cincinnati, Ohio:South Western Publishing Co.
- Ruin, J. E. (2003). *Audit Comittee: Going Forward Towards Corporate Governance* . Malaysian Institute of Corporate Governance ( MICG ).
- Carpenter, G. M. (2004). *Good Corporate Governance: Responding to Today"s New Business Enviroment*. Management Quarterly., 45 no 1.
- Darmawati, Deni., Khomsiyah., dan Rahayu, R. G. (2004). Hubungan *Corporate Governance* Dan Kinerja Perusahaan . Simposium Nasional Akuntansi VII. Denpasar.

- Deegan, C. (2004). *Financial Accounting Theory*. Australia: McGraw-Hill Australia Pty Limited.
- Diyanti, F. (2010). Mekanisme *Good Governance*, Karakteristik Perusahaan, Dan Mandatory Disclosure: Study Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Tesis Malang: Universitas Brawijaya.
- Farida, Yusriati Nur., Prasetyo, Yuli., dan Herwiyanti, E. (2010). Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* Terhadap Timbulnya Earnings Management Dalam Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi.*, 12.
- Peraturan Pemerintahan ., K. M. B. (2002). No Title. Tentang Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) Nomor Kep-117/M-MBU/200.
- Ross, Stephen., Westerfield, Randolph., Jordan, B. (2009). No Title. Pengantar Keuangan Perusahaan. Jakarta: Salemba 4.
- Sam'ani. (2008). No Title. Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2004 - 2007. Tesis. Semarang Universitas Diponegoro.
- Sukrisno Agoes. (2005). No Title. Penerapan GCG Pada Perguruan Tinggi. Auditor, No.18.
- Siswanto Sutoyo, & Aldridge, E. J. . (2005). *No Title. Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*. PT Damar Mulia Pustaka. Jakarta.